

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan *Belt Road Initiative* merupakan kerjasama yg dinilai memenuhi prinsip - prinsip dalam TRIMs. Hanya saja ada beberapa prinsip yang dilanggar dan tidak sesuai dengan *Agreement on trims* yang mana ketika praktek di lapangan dalam melaksanakan kebijakan Belt Road Initiative tersebut. Dalam ketentuannya TRIMs adalah perjanjian tentang aturan-aturan investasi yang memiliki aturan untuk mencapai tujuan sebuah pembangunan. Perjanjian TRIMs membantu negara anggota lebih transparansi dalam kebijakan hukum penanaman modalnya dalam suatu negara. Hal inilah yang membuat investor dan negara penerima investasi lebih terbuka dan mempunyai kepastian hukum untuk melakukan usahanya di negara anggota WTO. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal asing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994. Pentingnya prinsip National Treatment dan Prinsip Most - Favoured Nations menjamin tidak adanya tindakan diskriminatif terhadap negara - negara anggota. selain itu Pentingnya prinsip Transparant (Keterbukaan) dan kejelasan sketma investasi dalam kebijakan *Belt Road Initiative* ini, agar membuat negara peminjam pada akhirnya tidak terjebak dalam *China's Debt Trap*.
2. Melihat dalam proses pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta bandung dinilai tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh Tiongkok dan pemerintah Indonesia terkait penanaman modal asing.

Adapun Transparansi yang dimaksudkan, tidak adanya sketma investasi yang jelas terkait pembangunan kereta api cepat tersebut dimulai yang pada awalnya menargetkan biaya yang telah ditetapkan hingga pembangunan selesai terjadi pembengkakan biaya ketika proses pembangunan berjalan, dan juga yang awalnya menggunakan biaya dengan sketma bussnies to bussnies tanpa melibatkan uang dan jaminan dari negara hingga akhirnya berubah ketika proses pembangunan menggunakan APBN pemerintah Indonesia. Mengenai Prinsip *Transparancy* yang di langgar ini dimuat dalam perjanjian internasional yaitu TRIMs pada *Article 6*. Kebijakan belt road initiative telah melanggar prinsip prinsip *Agreement on TRIMs* yaitu prinsip transparansi, dikarenakan tidak adanya keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai kebijakan KCJB dalam melaksanakan pembangunan kereta api cepat ini, sehingga membuat proyek ini menuai banyak kritikan dari masyarakat dan anggota parlemen.

B. Saran

1. Kebijakan *Belt Road Initiative* merupakan suatu kebijakan dari Tiongkok yang memberikan dampak positif bagi pembangunan suatu negara. Negara perlu mengkaji lebih jelas terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Terkait kerja sama *Belt Road Initiative* tersebut pentingnya sketma penanaman modal asing terhadap pembangunan suatu negara penerima investasi. Adapun dalam setiap kerja sama antar kedua negara dalam penanaman modal asing diharapkan memenuhi perjanjian - perjanjian yang telah diatur dalam hukum internasional dan Nasional, seperti prinsip - prinsip dan ketentuan yang dimuat dalam TRIMs. Mereka yg melakukan kerjasama perlu melakukan keterbukaan atau transparansi mengenai informasi yang jelas terkait rincian perjanjian tersebut baik itu dari segi perencanaan, anggaran, maupun pelaksanaan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya *miss understanding* yang terjadi dikemudian hari.
2. Dalam proyek kereta cepat Jakarta - Bandung, transportasi adalah sarana pertumbuhan penting dan strategis dalam perekonomian, memengaruhi segala aspek kehidupan. Ketika pembangunan proyek kereta api cepat ini seharusnya pihak Indonesia dan Tiongkok perlu sekali mengkaji terkait kejelasan bagaimana sketma investasi terhadap kerja sama kedua negara dalam program *Belt Road Initiative* tersebut. Tiongkok dinilai tidak terbuka atau transparan yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan anggaran biaya dalam proses pengerjaan proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung dan juga yang semulanya berjanji tidak akan sama sekali menggunakan uang negara dan akhirnya menggunakan uang negara melalui APBN.

Adanya Transparansi sangat diperlukan sehingga tidak sampai terjadi kesalahan fatal dalam pengerjaan suatu proyek. Walaupun proyek ini mengalami hambatan dan mendapat banyak kritikan negative dari masyarakat Indonesia, proyek ini diharapkan terus di jalankan, karena proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah berjalan 79 %. Jika dibiarkan mangkrak akan menambah masalah baru, dan membuat kesan pemerintah hanya buang-buang uang saja. semoga untuk proyek selanjutnya sebaiknya pemerintah lebih teliti dan lebih bijak dalam memilih investor agar tidak terjadi pembengkakan saat proyek sudah berjalan.